



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1031 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal, telah ditetapkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal;
- b. bahwa terdapat pengajuan usulan nama Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal pada instansi/badan/lembaga yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
- c. bahwa terdapat Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1030 Tahun 2023 tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang telah dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan penetapan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, sehingga perlu mengeluarkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal pada Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang telah dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 969);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1648);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menandatangani Surat Keterangan Asal melalui penandatanganan secara basah disertai cap, *affix/scan* tanda tangan disertai cap, dan *digital signature/barcode*;
 2. meneliti dan memeriksa pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian internasional yang disepakati pada setiap permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal; dan
 3. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).
- KETIGA : Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1031 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2024

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
1	01.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI ACEH	BANDA ACEH	BDA	1. MOHD. TANWIER
					2. T. SATRIA WIRA
					3. HALIM FIRDAUS
					4. SUSILAWATI
					5. RIZKY WAHYUDI
2	01.09	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA	LHOKSEUMAWE	LSM	1. ISKANDAR
					2. IRWANDI
					3. YUSNAINI
3	01.11		TAKENGON	TKG	1. JUMADIL ENKA
					2. ABRAR GUNAWAN

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ACEH TENGAH			3. HADIYAN WIJAYA IB 4. SARINI MUHAMMAD ALI 5. DIKI SUHANDA
4	01.12	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BENER MERIAH	BENER MERIAH	BRM	1. KHAIRUN AKSA 2. SYAFRI RISWANDI 3. HASNAWI 4. OVA DANILA 5. EVA MULAINI
5	02.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA	MEDAN	MDN	1. MULYADI SIMATUPANG 2. AZRAI RIDHO HANAFIAH 3. ISSATRIANANDA EVI DORIA HAFNI 4. FERY ARIFianto
6	02.20	LEMBAGA TEMBAKAU MEDAN	MEDAN	TMD	1. M. ZAIN MA'RUFIN 2. FERRY HARRYANTO 3. INDRA KURNIAWAN

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
7	02.22	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI	SIMALUNGUN	KEK-SM	1. ELFI HARIS
					2. DIMAS ALDYAN
					3. DIANA STEPHANY TAMBA
					4. M. ZULHAM GINTING
8	03.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	PADANG	PDG	1. NOVRIAL
					2. RIDONALD
					3. DEFITRA
					4. RR. KOES INDRALINA
9	04.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU	PEKANBARU	PKB	1. M. TAUFIQ OESMAN HAMID
					2. TETTY NURDIANTI
					3. NURFIANTI
					4. ZIKRA MELINDA
					5. HALIMATUSAKDIAH
10	04.01		SELAT PANJANG	MTI	1. MARWAN
					2. IZAM

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI			3. HIDAYAT
11	04.03	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	TEMBILAHAN	TBL	1. MARTA HARYADI 2. SALBIAH 3. EKA RHANTY WARDANI
12	04.04	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN	TANJUNG PINANG	TGP	1. ASY SYUKRI 2. SETIA KURNIAWAN 3. YUNITASARI
13	04.05	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG	BINTAN	KEK-GB	1. VITA BUDHI SULISTYO 2. DEVI OCTARINA
14	04.06	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS	BENGKALIS	BLS	1. ZULPAN 2. YOAN DEMA 3. MARLIYA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
					4. IBRAHIM
					5. SUNARTI
15	04.14	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI	DUMAI	KDM	1. FAZRUL BASRI
					2. WAN SUDIRMAN
					3. MARWANTI
					4. SLAMAT RIYADI
					5. AMI LAILY
16	04.15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM	BATAM	KBM	1. GUSTIAN RIAU
					2. WAHYU DARYATIN
					3. ABDUL RASYID
					4. TOVANI WAHYU HANDAYANI
17	21.02	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN	KARIMUN	KRM	1. FAISAL RIZAL
					2. SULARNO
					3. HAZNU ZAMSYAH
					4. ANTON WIJAYA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
18	04.16	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	BATAM	BTM	1. SURYA KURNIAWAN SUHAIRI
					2. RULLY SYAH RIZAL
					3. WILMAR SITORUS
19	05.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI	JAMBI	JMB	1. KEMAS MUHAMAD FUAD
					2. BAHRUL AKBAR
					3. FATIMAH
20	06.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	PLB	1. AHMAD RIZALI
					2. ACHMAD MIRZA
					3. FAROHMA
21	07.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU	BENGKULU	BKL	1. YENITA SYAIFUL
					2. ASFIANI
					3. RIA AYU WIDYASARI
					4. BUNGE GERALDINE
					5. MARLIN HELMI
22	08.00			BDL	1. ELVIRA UMIHANNI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG		2. RATNA MELIASARI 3. JUWITA PRIMA
23	31.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	PPG	1. FADJRI DJAGAHITAM 2. DARMA KURNIAWAN 3. BENNY ASMARA
24	31.02	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	TANJUNG PANDAN	TPP	1. SYAMSUDDIN 2. RONAL IRAWAN 3. NOVITA KESUMAWATI
25	30.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN	BANTEN	BTN	1. BABAR SUHARSO 2. ZULKARNAEN 3. RIFKI RAMADONA 4. EULIS MULYANA 5. TANIA NUR RIZKIAH
26	30.01		SERANG	SER	1. ADANG RAHMAT

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG			2. TITI PURWITASARI 3. ACEP PELITA JAYA
27	30.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANGERANG	TIGARAKSA	TGR	1. RESMIYATI MARNINGSIH 2. ARIEF RACHMAN TAUFIK 3. SYAMSUL ARIF HIDAYAT 4. ANGGARDHA PARAMITA 5. ETI SULASTINI
28	30.05	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TANGERANG	TANGERANG	KTG	1. SULI ROSADI 2. SHANDY SULAEMAN 3. OKI RAHMADI 4. VIVIN PRATAMI 5. MAJURI
29	30.06		CILEGON	KCG	1. ANDRIYANTI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA CILEGON			2. EMA HERMAWATI 3. FAISAL 4. MUHAMMAD DEDI JAUHARI 5. ACHMAD THOYIB
30	09.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA	JAKARTA	JKT	1. ELISABETH RATU RANTE ALLO 2. FRIDA ELIZABETH 3. NUZULA DHINA P. 4. BADIA RAJA H. SIREGAR 5. UPI SUSTILALIZA
31	09.01	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	JKS	1. PARULIAN TAMPUBOLON 2. SISCA MAYA KADANG 3. MARTA LAMINDO SIANTURI 4. JEPRI FITRIANA USMAN
32	09.02	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA	CAKUNG	JKM	1. DERLIANA MELINDA SAGALA 2. RIANA LIESDAWATY

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			3. PARTINI
					4. DENOK WAHYUNINGTYAS
					5. NANDA VIRGI NUGRAHA
33	09.03	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	JKP	1. TIENDA DAMAYANTI
					2. VICKY SURYAWAN JAYA
					3. HERMI ANDRIANI
					4. JENAL ARIPIIN
					5. DARWAN HAKIM
34	09.04	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PURI KEMBANGAN	JKB	1. IQBAL IDHAM RAMID
					2. NESVY PANDJAITAN
					3. EEN HERAWATI
35	09.05	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA	TANJUNG PRIOK	JKU	1. YATI SUDIHARTI
					2. ANDINI SUTIANTI
					3. HERLINA SUSIANTI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			4. NURPIDA
					5. ERNI
36	09.06	PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA SBU KAWASAN CAKUNG	CAKUNG	KBN-CK	1. ALIF ABADI
					2. SATRIO WITJAKSONO
					3. PRATIKTO DERMAWAN NUZUL
					4. EEN HENDAYANI
37	09.08	PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA SBU KAWASAN MARUNDA	MARUNDA	KBN-MR	1. ALIF ABADI
					2. SATRIO WITJAKSONO
					3. ROOSENO
					4. EDWARD SISWANTO
					5. HARDO DEDALI
38	10.00		BANDUNG	BDG	1. NONENG KOMARA NENGSIH
					2. LUKMANULHAKIM

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT			3. DINDIN HADIAN
					4. RAHMAWATI RETNO ASTUTI
					5. PRAMESTY WIDYATMOKO
39	10.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOGOR	CIBINONG	CBN	1. ARIF RAHMAN
					2. DESIRWAN KUSLAN
					3. YAYAN TAHYAN
					4. YANG SINI
					5. HENDAR SUHENDAR
40	10.02	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUKABUMI	SUKABUMI	SKB	1. IRWAN FAJAR
					2. VICTOR DOLLAR PARDOMUAN
					3. TUTIK HERYANTI
41	10.04	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG	SOREANG	SRG	1. DICKY ANUGRAH
					2. WAHYU WARTANTI
					3. LILIS NURHAYANI
					4. DIDI KUSDIAMAN

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
42	10.06	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA	TASIKMALAYA	TSM	1. IWAN RIDWAN
					2. SOUFIAN
					3. SALSAH
					4. NURDANI
43	10.09	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON	SUMBER	SBR	1. DADANG RAIMAN
					2. SUHERMAN
					3. INNA KURNIAWATI
44	10.14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA	PURWAKARTA	PWA	1. KARLIATI JUANDA
					2. IWAN MUSTAWA
					3. NANA SUMPENA
					4. BAMBANG KOSWARA
					5. RIENRI KAMAYANTY
45	10.15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARAWANG	KARAWANG	KRW	1. YAYAT HIDAYATULLOH
					2. AHMAD MUSTOPA
					3. AHMAD RIFAI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
					4. SUSILAWATI
					5. HENDAR
46	10.16	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BEKASI	BEKASI	BKI	1. GATOT PURNOMO
					2. RUMENGAN TANGGULUNGAN
					3. NI GALUH CHANDRA
					4. AGUS BURHAN AHMAD FARIZ
					5. YULIATI
47	10.18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SUKABUMI	SUKABUMI	KSM	1. AGUS WAWAN GUNAWAN
					2. ADE DARMAWAN
					3. DEDEN SUPRIYATMAN
					4. RISMAWAN
48	10.19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANDUNG	BANDUNG	KBD	1. ELLY WASLIAH
					2. BARIATI RATNA AJU
					3. MUAMMAR KHADDAFI F B
					4. MUHAMMAD QADAFI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
					5. GERALDO GUNAWAN
49	10.20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIREBON	CIREBON	KCR	1. IING DAIMAN
					2. FAJAR FARHANI
					3. MARTINI
50	10.21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI	BEKASI	KBS	1. ROBET TUA PARLUHUTAN SIAGIAN
					2. ROMI PAYAN
					3. NURBAITI
					4. AGUS PURWANTO
					5. RUSIAH
51	11.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	SEMARANG	SMR	1. RATNA KAWURI
					2. NUR RAHMI SA'ADAH
					3. WENINGDIAH NURUL HIKMAH
					4. AGUS TRIYONO
					5. SOFIYANTI
52	11.01		CILACAP	CLP	1. UMAR SAID

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP			2. MUHAJIR
					3. MOESTIKA PERMANA SARI
					4. BUANG SURIPTO
53	11.02	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL	KENDAL	KEK-KD	1. TJERTJA KARJA ADIL
54	11.31	DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA	SURAKARTA	KSR	1. HERU SUNARDI
					2. ERNI SUSIATUN
					3. ENDANG KURNIA MAHARANI
					4. VERONICA ERNA KUSUMANINGSIH
55	11.36	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA	SURAKARTA	TSL	1. SRI SUPADMI RAHAYU
					2. HIMAWAN PUJI NUGROHO
					3. HARTINI UTAMI
56	12.00		YOGYAKARTA	YGA	1. SYAM ARJAYANTI
					2. IDA SURYANTI LESTARI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			3. THERESIA SUMARTINI 4. GUNTUR WAHYU ANGGORO
57	13.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	SURABAYA	SBY	1. IWAN 2. ERIVINA LUCKY KRISTIAN 3. PUSPITA PRAMILUWATI 4. NURING RETNOWATI 5. ELOK SYAFIRDA
58	13.10	DINAS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI	BANYUWANGI	BNW	1. RR. NANIN OKTAVIANTIE 2. AGUSTINUS HARSONO 3. SITI MAHMUDAH
59	13.14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN	PASURUAN	PSR	1. DEDDY IRAWAN YULIANTO 2. EKO PARINGAN 3. SUBAKTI UTOMA
60	13.25	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,	GRESIK	GRS	1. MALAHATUL FARDAH

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK			2. YOEDI SETIYONO 3. ZAINI SA'DAN 4. RIKE ROOSWITA
61	13.38	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU JEMBER	JEMBER	TJB	1. SUNARYO 2. BUDI NUGRAHENI 3. KUKUK TRI WAHYUNINGTYAS
62	13.39	UPT. PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU SURABAYA	SURABAYA	TSB	1. ABDIEL POPANG KABANGA 2. NUR ROSYID WICAKSONO 3. YENI YULIATI 4. SITI SAROH
63	13.40	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GRESIK	GRESIK	KEK-GR	1. IBNU SINA
64	14.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	PTA	1. SYARIF KAMARUZAMAN 2. EKO DARMAWANSYAH 3. DWI YOGA DIANA FITRI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
65	15.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	KPY	1. ASTER BONAWATY M
					2. ADI SOESENSO
					3. PRAMUDYA ERLANGGA
					4. EVELINA DIAN MAYASARI
66	15.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	PANGKALAN BUN	PKN	1. MUHAMMAD AGUSTA WIJAYA
					2. SAID MAHMUD
					3. DARMADI
67	15.02	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	SAMPIT	SPT	1. ZULHAIDIR
					2. DINA MARIA KRISSETIA SIMAMORA
68	15.03	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KAPUAS	KUALA KAPUAS	KKP	1. APENDI
					2. ANITA SUMARNI MULDHANI
					3. YUSI PRIHATINI
					4. RAHAYU TRIS GIPIYANTO
					5. RUSNANINGSIH

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
69	16.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SMD	1. MUHAMMAD SA'DUDDIN
					2. ALI WARDANA
					3. HERA NURAENI
70	16.03	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BERAU	TANJUNG REDEP	TJR	1. EVA YUNITA
					2. HOTLAN SILALAH
					3. JOKO MARIONO
					4. JULKIPLI
					5. NORALITA
71	16.09	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BONTANG	BONTANG	KBG	1. KAMILAN
					2. SUNITA SINAGA
					3. MULYONO
72	16.10	DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN	BALIKPAPAN	KBL	1. HAEMUSRI
					2. ADI SUDARTO
					3. DEWI SARTIKA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
73	16.12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA TARAKAN	TARAKAN	KTR	1. SUTRISNO
					2. ERNI MARDI ASTUTI
					3. EMMA RATNA FURI
					4. RUDY HERMANTO
74	16.13	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN	NUNUKAN SELATAN	NNK	1. SABRI
					2. R.DIOR FRAMES
					3. SAPARUDDIN
75	16.14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR	SANGATTA	KTT	1. H.M. REZA FAHLEVI
					2. ANDI NUR HADI PUTRA
					3. PRATAMA ERWIN HARYANTO
					4. SELAMAT AHYADI
					5. KHOIRUROH
76	17.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	BJM	1. MUHAMMAD SYARIEF
					2. RIZKI ADHANI FADILA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
					3. MAKMUR RIADH 4. DINA MAHRITA 5. AZHARI
77	17.01	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTABARU	KOTABARU	KBR	1. HARDHANI 2. ARY MARDANI 3. ARIYANI
78	18.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI BALI	DENPASAR	DPS	1. NI WAYAN LESTARI 2. I GUSTI NYOMAN GDE SATRYA WIBAWA 3. GUSTI AYU KADE SUWASTI TANTRA 4. PARAMITA ADNYANA
79	18.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR	GIANYAR	GIR	1. NI LUH GEDE EKA SUARY 2. DEWA AYU PUTRA BUDIATI 3. IDA BAGUS KETUT WAHYUNADA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
80	19.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	MTR	1. BAIQ DENNY EVITA DARMIYANA
					2. LALU UMAR SYARIF
					3. RACHMAT WIRA PUTRA
					4. ERVINA SEPTIANTI
81	33.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	KPG	1. HERLYN SILVY MANAFE
					2. LAURENSIUS L. KLEDEN
					3. AUGUSTINUS FRUMENTIUS HB
82	21.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	MKS	1. I DEWA NYOMAN MAHENDRAJAYA
					2. FADILAH RAHMAN PATURUNGI
					3. MUNARTI
					4. SYAMSIDAR
83	22.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	PALU	PLU	1. RICHARD ARNALDO
					2. FAJAR SETIAWAN
					3. FIKRI
84	22.01		LUWUK	BGI	1. NATALIA PATOLEMBA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANGGAI			2. SRIHANDAYANTI MAADJI 3. BONNY FIRMAN SAMBETA 4. APRIANI OGOTAN 5. YULIANTI LAMALIU
85	22.02	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU	PALU	KEK-PL	1. HERMAN FARID 2. IRWAN INDRAYANA 3. DELVI DIAN SUSANTI
86	34.00	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM PROVINSI SULAWESI BARAT	MAMUJU	MJU	1. BAU AKRAM DAI 2. MUH. NAJIB ALI 3. MUH. RUSDIN
87	32.00	DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO	GORONTALO	GTL	1. RISJON K SUNGE 2. IWAN AHMAD SONDAKH 3. EKA WIDYASTUTI
88	23.00		MANADO	MND	1. DANIEL A. MEWENGGANG

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA			2. STEYFEN R. LASUT 3. JEMMY J. PANDEY 4. ELLEN T. SUMANTO
89	23.05	DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG	BITUNG	KBU	1. JOHNLI E. TAMAKA 2. HENGKY M. SUMLANG 3. MARTINA A. KORAAG
90	24.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	KENDARI	KDR	1. SITTI SALEHA 2. MUSLIMIN 3. LUWUK 4. HASNAWATI
91	25.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU	AMBON	ABN	1. YAHYA KOTTA 2. MARLIN MARIANY HELUTH 3. VIVIANNY STELLA RISAKOTTA 4. ZAINAB USEMAHU 5. MARVIN ARTHUR PELUPESSY

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
92	26.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	TERNATE	TNT	1. YUDHITYA WAHAB
					2. MUHAMMAD ABDU DJAFAR
					3. FARIS BUAMONA
93	28.02	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	SERUI	SRI	1. JAVED O. SIPAHELUT
					2. ABDUL HAKIM
					3. HARSUL LANDUNG
94	29.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SORONG	SORONG	SOR	1. MARTEN LUTER PAJALA
					2. MARSYUKI
					3. JENNY FONATABA
					4. ACHMAD RONDYA
95	29.02	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MANOKWARI	MANOKWARI	MNR	1. YAN AYOMI
					2. ABDUL RACHMAN
					3. THERESIA.S.M.R HAMMAR
96	29.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	TIMIKA	MMA	1. PETRUS PALI AMBAA
					2. SELFINA PAPPANG

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		KABUPATEN MIMIKA			3. DEVILIA LITA PALUMPUN
					4. LIBERT YAN MANGGARA

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati